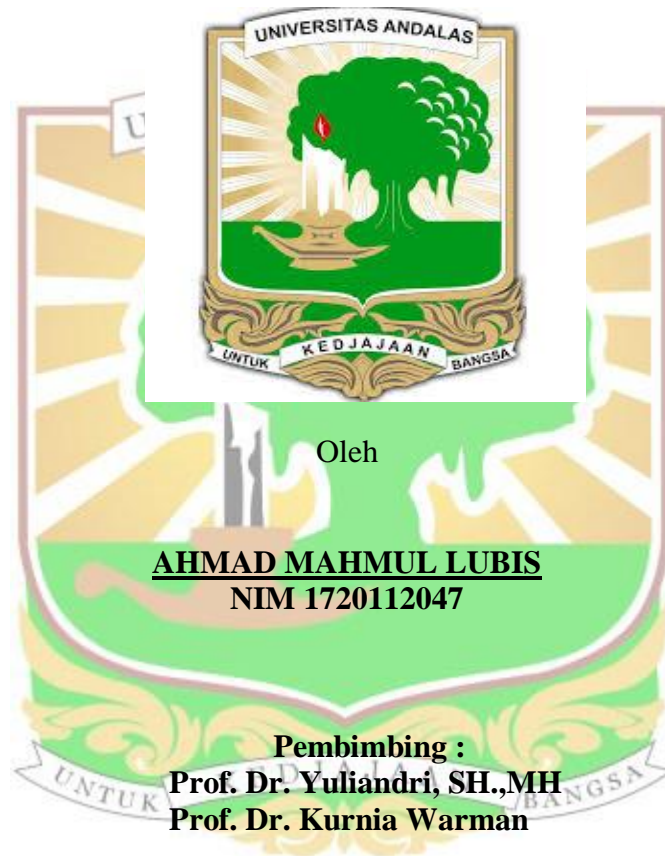


**EVALUASI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
PASAMAN BARAT OLEH GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH
PUSAT DI DAERAH**

TESIS

Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTASHUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2021**

**EVALUASI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN
BARAT OLEH GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI
DAERAH**

Ahmad Mahmul Lubis, NIM 1720112047, Program Studi Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021, 118 Halaman

ABSTRAK

Pasal 1 Angka 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Rumusan Masalah: 1). Bagaimanakah proses evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang digunakan oleh Kabupaten Pasaman Barat? 2). Bagaimanakah Kabupaten Pasaman Barat menindak lanjuti hasil evaluasi terhadap rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah? 3). Bagaimanakah implikasi hukum jika hasil evaluasi tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Kabupaten Pasaman Barat? Metode Penelitian adalah Yuridis Sosiologis terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, dikumpulkan melalui penelitian lapangan, data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Proses evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang digunakan oleh Kabupaten Pasaman Barat: a. Pembentukan Peraturan tentang RPJMD, disesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati Terpilih, b. Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan perda Provinsi berdasarkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten. 2). Kabupaten Pasaman Barat menindak lanjuti hasil evaluasi terhadap rencana. Tim penyusun mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan Perguruan Tinggi atau Ormas, b. Pimpinan perangkat daerah membidangi hukum mengoordinasikan pengharmonisan, pembulatan, pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat, dan mengikutsertakan instansi vertikal dari perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 3). Implikasi hukum jika hasil evaluasi tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Kabupaten Pasaman Barat: Mahkamah Agung membatalkan Perda dimaksud atas rekomendasi gubernur melalui Menteri.

Kata Kunci: Evaluasi Rancangan Perda, Pembentukan Peraturan Daerah, Kewenangan Gubernur

EVALUATION OF FORMATION OF REGIONAL REGULATIONS MEDIUM TERM DEVELOPMENT PLAN FOR THE REGENCY OF PASAMAN BARAT BY THE GOVERNOR AS REPRESENTATIVE OF THE CENTRAL GOVERNMENT IN THE REGION

Ahmad Mahmud Lubis, NIM 1720112047, Postgraduate Legal Studies Program, Faculty of Law, Andalas University, 2021, 118 pages

ABSTRACT

Article 1 Number 16 Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 120 of 2018 concerning Amendments to Permendagri Number 80 of 2015 concerning the Establishment of Regional Legal Products, is the making of regional laws and regulations which include the stages of planning, drafting, discussing, stipulating, enacting, and disseminating . Problem Formulation: 1). What is the evaluation process carried out by the Governor on the draft Regional Regulation on the Regional Medium-Term Development Plan used by West Pasaman Regency? 2). How does West Pasaman Regency follow up on the results of the evaluation of the planned Regional Regulation on the Regional Medium-Term Development Plan? 3). What are the legal implications if the results of the evaluation are not followed up by West Pasaman Regency? The research method is Juridical Sociology consisting of Primary Legal Materials and Secondary Legal Materials, collected through field research, data analyzed qualitatively. The results of the study: 1) The evaluation process carried out by the Governor on the draft Regional Regulation on the Regional Medium-Term Development Plan used by West Pasaman Regency: a. The establishment of a regulation on the RPJMD, adjusted to the Vision and Mission of the Elected Regent, b. The initiating Regional Apparatus compiles a design Provincial regulations based on the Program for the Establishment of Regency Regional Regulations.2). West Pasaman Regency to follow up on the results of the evaluation of the plan a. The drafting team invites researchers and/or experts from universities or mass organizations, b. The head of the regional apparatus in charge of law coordinates harmonization, unanimity, consolidation of the conception of the Draft Regional Regulation of West Pasaman Regency, and includes vertical agencies from the provincial apparatus that carry out government affairs in West Pasaman Regency. the field of law. Regional Regulation on Regional Medium-Term Development Plan 3). Legal implications if the results of the evaluation are not followed up by West Pasaman Regency: The Supreme Court annulled the Perda on the recommendation of the governor through the Minister.

Keywords: Evaluation of Draft Regional Regulations, Formation of Regional Regulations, Governor's Authority